

# Kapolri Minta Jokowi Terbitkan Perppu Terorism

kumparanNEWS

Minggu 13 Mei 2018 - 18:13



Kapolri Tito di Mako Brimob (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mendesak DPR untuk segera menyelesaikan revisi UU Anti Terorisme. Jika masih belum tuntas, Tito meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu Anti Terorisme.

"UU ini harus segera direvisi. Kalau te rralu lama, kita mohon Presiden untuk membuat Perppu," ujar Tito usai mendampingi Presiden Jokowi di RS Bhayangkara, Surabaya, Minggu (13/5).

Tito menyebut UU Anti Terorisme yang ada saat ini membatasi aparat dalam pencegahan maupun penindakan teroris.

"Kita tahu sel-sel mereka tapi kita tidak bisa menindak. Kita menindak kalau mereka melakukan aksi atau sudah jelas ada b arang buktinya. Kita ingin lebih dari itu," ujar Tito.

Baca Juga :

- [Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Jaringan Bomber Surabaya](#)
- [Jokowi: Tindakan Terorisme Ini Biadab dan Keluar Batas Kemanusiaan](#)
- [Bom yang Meledak di Gereja di Surabaya Bom Bunuh Diri](#)

Kapolri berharap dalam revisi UU Anti Terorisme yang baru, terdapat pasal yang bisa menetapkan JAD-JAT sebagai organisasi teroris. Sehingga siapapun yang bergabung dengan organisasi ini bisa dipidana.

"Sebab korban terus berjatuhan. Sementara yang kembali dari Suriah 500 orang dan kita enggak bisa buat apa-apa. Kalau kita tidak melakukan apa-apa hanya 7 hari menahan lalu lepas," katanya.

## Golkar dorong tuntasan RUU Antiterorisme

Senin, 14 Mei 2018 09:22 WIB



*Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha (kiri) usai pergantian pimpinan komisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2018). Satya Widya Yudha menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR menggantikan Meutya Hafid dari Fraksi Partai Golkar. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)*

Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Golkar mendorong para pihak terkait segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Antiterorisme sebagai respon atas aksi terorisme beruntun sekarang ini.

"Fraksi Partai Golkar (FPG) merespon positif bahwa payung hukum tindak kejahatan terorisme harus diperkuat. Anggota Pansus RUU Antiterorisme dari FPG kami dorong agar aktif menuntaskan RUU Antiterorisme segera dengan memperhatikan situasi negara yang genting atas aksi terorisme baru-baru ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Anggota DPR RI asal Jawa Timur itu mengatakan bom bunuh diri yang terjadi pada Minggu (13/5) di Surabaya, Jatim, merupakan aksi terorisme yang tidak bisa ditoleransi.

"Negara tidak boleh kalah terhadap tindak kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa masyarakat sipil dan aparat keamanan tersebut," kata Satya yang kediamannya hanya berjarak 100 meter dari lokasi bom bunuh diri di Gereja Santa Maria, Ngagel, Surabaya tersebut.

Pada Selasa-Kamis (8-10/5), aksi terorisme juga terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Salemba di Markas Komando Brimob, Depok, Jabar.

Satya menegaskan segala bentuk aksi terorisme yang terjadi di Indonesia harus diberantas karena akan mengganggu stabilitas keamanan nasional dan oleh karena itu, payung hukum atas tindakan terorisme harus diperkuat.

Ia mengakui pembahasan RUU Antiterorisme sampai saat ini masih belum selesai.

Dengan rentetan aksi terorisme dalam sepekan ini, lanjutnya, maka RUU Antiterorisme sudah penting untuk kembali dibahas dan segera dituntaskan.

"Rentetan aksi terorisme saat ini menumbuhkan semangat bersama, bahwa RUU Antiterorisme sudah sangat *urgent*. Kami harap segera dituntaskan. Kami menunggu respon pemerintah untuk duduk bersama kembali, agar RUU Antiterorisme bisa disahkan dalam masa sidang berikutnya ini," ujarnya.

Satya mengharapkan pihak pemerintah juga segera satu suara dalam menuntaskan RUU Antiterorisme.

"Saya dengar, mayoritas fraksi di Pansus RUU Antiterorisme di DPR sudah sepaham dan bersatu, tinggal menunggu pihak pemerintah yang tampaknya belum satu suara, karena setiap merumuskan satu kalimat atau paragraf, pemerintah selalu minta waktu kembali untuk membahas secara intern di pemerintah. Jadi bolanya justru ada di pemerintah, kami menunggu," paparnya.

Bahkan, sambungnya, jika memang dinilai sangat mendesak karena situasi darurat nasional atas aksi terorisme, maka pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Saya yakin DPR pun akan segera merespon positif," kata Satya.

Pewarta: Kelik Dewanto

Editor: Unggul Tri Ratomo